BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk itu instansi Pemerintahan Kota Ambon sangat tepat bagi Mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Jurusan Manajemen Informatika, khususnya di bagian Kantor Pelayanan Data Elektronik (KPDE)

Di bagian ini mahasiswa diharapkan dapat mengetahui proses dan prosedur mendapatkan suatu layanan yang disebut Pelayanan Perizinan Dalam menyelesaikan prosedur layanan ini masyarakat masih sulit untuk menjalankan setiap langkah karena sangat menyita banyak waktu dalam proses permohonan izin hingga proses penyelesaian izin yang berbelit-belit, sehingga nantinya diharapkan industri perorangan/industri besar dapat dengan mudah mendapatkan izin usahanya.

Tabel 1. 1

Perbandingan Kemudahan Usaha di Indonesia dengan Negara ASEAN lainnya.

Negara	Rangking Keseluruhan	Rangking (memulai bisnis)	Jumlah Izin yang dibutuhkan	Waktu (hari)	Biaya (% dari GNI/kapita)
Singapore	1	10	4	4	0.7
Malaysia	20	75	9	13	14.7
Thailand	13	44	8	33	4.9

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Indonesia	129	171	11	76	77.9
Brunei	88	130	18	116	9.2
Vietnam	92	108	11	50	16.8
Filipina	140	155	15	52	29.8
Cambodia	135	169	9	85	151.7
Laos	165	92	8	103	14.1
Timor Leste	170	150	10	83	6.6
Rata-rata Asia dan Timur Pasifik	1	10	8.6	44.2	32.3

Sumber: World Economic Forum(WEF)

Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Dalam melaksanakan pembangunan, Promosi Investasi Dalam Negeri, melalui konsep pelayanan perijinan terpadu satu pintu dilaksanakan oleh daerah dengan dilatar belakangi oleh hal-hal antara lain:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia menugaskan Menpan dan Kepala BKPM RI untuk melakukan Penyederhanaan Perizinan Berusaha Di

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Indonesia dalam rangka menaikkan peringkat Indonesia dari 135 (menurut penilaian Bank Dunia/IFC) menjadi peringkat ke 70.

2. Berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2006 Tanggal 27 Februari 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi isinya antara lain menyederhanakan proses pembentukan Perusahaan dan Izin Usaha dari 150 hari menjadi 30 hari.
3. Permendagri No. 24 Tahun 2006 Tanggal 6 Juli 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Pasal 11 jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan paling lama 15 hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya sesuai pasal 29 paling lambat 1 tahun Sejak peraturan menteri ini ditetapkan).

Salah satu tujuan utama kebijakan otonomi daerah adalah mendekatkan jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan yang tadinya direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh instansi sektoral pusat, kemudian dialihkan kewenangan pengurusnya kepada pemerintah daerah. Disamping itu, pemerintah daerah juga terus menerus berupaya mempertajam & meningkatkan kualitas serta kuantitas pelayanan sebagai wujud keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.

Pelayanan publik yang diberikan selama ini masih terkesan lambat, berbelit-belit, biaya tinggi dan birokrasi yang panjang. Hal ini merupakan hambatan bagi masyarakat yang mengakibatkan hal negatif, diantaranya:

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1. Untuk Masyarakat Umum:

    a) Masyarakat menjadi tidak taat hukum dalam mengajukan perizinan.

    b) Tidak adanya rasa aman dan nyaman dalam kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Untuk Investor:

    a) Investor enggan untuk dapat berinvestasi

    b) Kurang terserapnya tenag kerja yang potensial di daerah karena sedikitnya investor yang masuk daerah.

3. Untuk Pemerintah Daerah:

    a) Dituntut untuk mampu menunjukan diri sebagai pelayanan masyarakat yang baik (Good Governance yang bebas KKN).

    b) Mengharapkan agar masyarakat taat hukum dan aturan dalam mengurus perizinan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terdapat permasalahan yuridis dalam pelaksanaan perizinan bagi industri di kota Ambon yang perlu dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini, yang berjudul ” **SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP DI PEMERINTAHAN KOTA AMBON**

”

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Pemerintah kota Ambon yang sedang ingin mengembangkan pelayanan di perizinan ingin mengembangkan suatu Tempat Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengolahannya membutuhkan penyelesaian teknis disampaikan kepada dinas terkait. Untuk melakukannya haruslah terhubung jaringan LAN maupun WAN dalam kontrol sistem pelayanan terpadu satu pintu.

Dengan adanya PTSA diharapkan dapat memberikan pelayanan optimal untuk mengurus berbagai pelayanan perizinan secara cepat, tepat, mudah, murah dan singkat. Serta adanya kepastian hukum hanya melalui satu tempat (one stop service). Dengan demikian masyarakat maupun investor tidak repot untuk mengurusi perizinan.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

I. Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan yang dapat dirinci dari kegiatan perizinan selama ini diterapkan pada pelayanan publik pemkot Ambon adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan publik terkesan lambat, berbelit-belit, biaya tinggi dan birokrasi yang panjang.

2. Tidak adanya suatu kepastian waktu penyelesaian surat perizinan.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3. Belum adanya suatu data/inforrmasi perizinan yang terpadu.
4. Sistem kearsipan dokumen perizinan belum dikelola dengan baik.
5. Belum adanya mekanisme monitoring dan kontrol untuk mengetahui status perizinan.

II. Rumusan Masalah

1. Mengapa Pelayanan Publik terkesan berbelit-belit biaya tinggi dan birokrasi yang panjang?
2. Mengapa membutuhkan waktu yang lama untuk penyelesaian surat perizinan
3. Mengapa sampai belum ada data/informasi perizinan yang terpadu?
4. Bagaimana sistem pengarsipan dokumen perizinan, dan mengapa sampai belum dikelola dengan baik?
5. Mengapa sampai belum adanya mekanisme monitoring dan kontrol yang baik untuk mengetahui status perizinan?

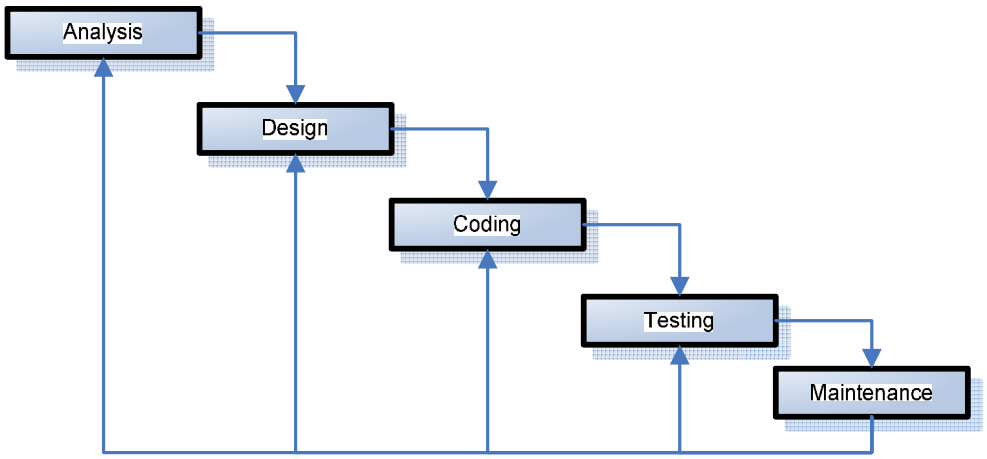
1.3. Maksud dan Tujuan Praktek Kerja Lapangan.

Maksud dilaksanakan Praktek Kerja Lapangan adalah untuk mengimplementasikan pengetahuan yang didapat di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang sesungguhnya dilapangan, sedangkan tujuan dilaksanakannya kerja praktek adalah untuk :

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1. Untuk mengetahui Sistem Informasi Perizinan Satu Atap yang sedang berjalan di Pemerintah Kota Ambon.
2. Untuk membuat perancangan sistem Informasi Perizinan Satu Atap di Pemerintah Kota Ambon.

1.4. Metode Pengembangan Sistem



a) Pemilihan Teknologi Informasi

Sistem Informasi Pemerintah Kota Ambon akan dibangun dengan platform web based application menggunakan perangkat lunak Open Source Software. Perangkat lunak (software) yang digunakan dalam pengembangan SI Pemerintah Kota Ambon adalah sebagai berikut:

1. Programming script : PHP 5
2. Database Management System : PostgreSQL

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3. Server Operating System : Linux Kernel 2.6

4. Client Operating System : XP professional.

5. Web Server : Apache

6. Utility Viewer : PDF Viewer

1.5. Batasan Masalah

Sebuah sistem informasi dalam menyajikan informasi haruslah memiliki media penyaji informasi. Media disini dapat berupa aplikasi/sofware dan perlengkapan hardware yang digunakan untuk menyajikan Informasi tersebut.

Namun untuk membatasi masalah yang akan diangkat oleh penulis, disini penulis hanya membahas perancangan sistem informasi terpadu yang meliputi modul-modul antara lain SIMANTAP (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Satu Atap) pada Pemerintah Kota Ambon dengan menggunakan Data Flow Diagram (DFD) yang merupakan metode yang dapat digunakan khusus untuk perancangan sebuah sistem.

1.6. Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Lokasi kerja praktek bertempat di kota Ambon, yaitu di Pemerintahan Kota Ambon pada bagian Kantor Pengolahan Data Elektronik, yang beralamat di Jl Sultan Hairun No.1 Bandung. Kerja praktek berlangsung selama 1 (satu) bulan yaitu dari 5 (lima) Agustus sampai 5 (lima) September 2010. Praktek kerja

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

berlangsung setiap hari senin sampai dengan jum'at pada pukul 07.00 WIT sampai 16.00 WIT. Kecuali hari sabtu dan minggu libur.

Adapun jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dan Penulisan Laporan Tugas Akhir September 2010, secara rinci pada tabel 1.2 sbb:

Jadwal Pelaksanaan

Praktek Kerja Lapangan dan Penulisan Laporan Tugas Akhir

No	Aktivitas	Waktu				
1	Pengenalan Lapangan	x				
2	Kerja Praktek		x			
3	Pengumpulan Data		x	x		
4	Penyusunan Laporan			x	x	
5	Pengumpulan Laporan					x

Tabel 1.2

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional